

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar kerangka pemikiran dari pengajuan hipotesis. Hal-hal yang akan disajikan pada bab ini mencakup tinjauan yang menjelaskan konsep dari variabel yang akan diteliti serta pembahasan tentang penelitian terdahulu. Selain itu, kerangka berpikir juga akan dijelaskan pada bagian ini. Kerangka berpikir ditulis untuk menjelaskan seperti apa model dan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Bahasan terakhir dari bab ini adalah hipotesis yang diajukan peneliti.

2.1.1. Kemiskinan

2.1.1.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995 dalam Elvira Handayani Jacobus, 2018). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Menurut Nurwati (2008), kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

2.1.1.2. Teori Kemiskinan

Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.

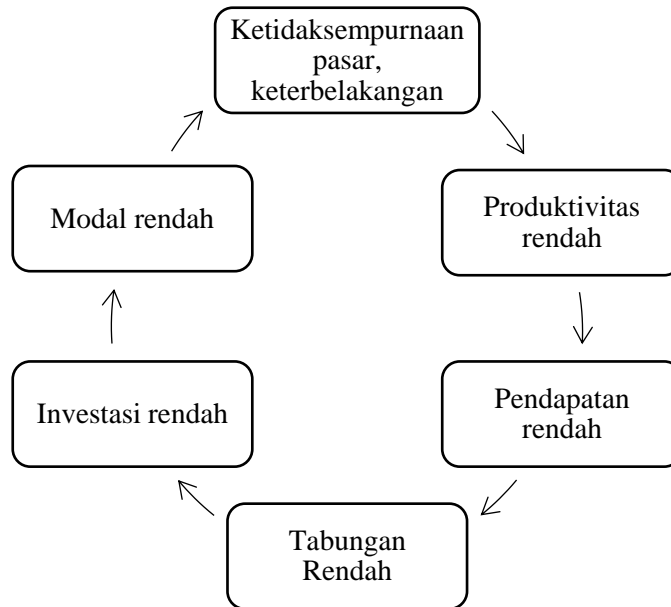
1. Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan merupakan permasalahan individu bukan permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Dan tidak hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.

2. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pada pendukung Sosial-Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan.

Begitu banyaknya pendapat mengenai teori kemiskinan sehingga faktor yang mempengaruhi kemiskinan pun juga berbagai macam. Untuk itu penulis merangkum beberapa teori tentang kemiskinan yang dijadikan dasar teori penelitian. Salah satunya yaitu konsep kemiskinan menurut *World Bank* bahwa kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Dikatakan demikian jika orang yang tidak sejahtera dapat digolongkan sebagai orang miskin (terjadi kemiskinan). Dikatakan terjadi kemiskinan jika tidak sejahtera yang mana kesejahteraan dapat diukur dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Teori kedua yang digunakan yaitu Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953). Teori tersebut mengemukakan bahwa kemiskinan tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan.



Gambar 2.1

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Gambar diatas merupakan grafik Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse (1953) bahwa kemiskinan (ketidaksejahteraan) dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga bagian untuk tabungan dan investasi berkurang. Berkurangnya investasi berakibat pada rendahnya modal. Rendahnya modal akan menyebabkan ketidaksempurnaan pasar dan terjadinya keterbelakangan. Hal tersebut terus bergerak melingkar sehingga tidak mempunyai ujung dan pangkal.

2.1.1.3. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Suryawati (2004), berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas,

pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terka dang memiliki unsur diskriminatif.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah :

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep

pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang.

2.1.1.4. Faktor Penyebab Kemiskinan

Setiap permasalahan yang timbul pasti karna ada faktor yang mengiringnya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Hudyana (2009) yaitu :

1. Terbatasnya Lapangan Kerja

Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

2. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

3. Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

2.1.1.5. Jumlah Penduduk Miskin

Mengikuti definisi BPS, penduduk miskin adalah mereka yang tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2009).

Dalam konteks pembangunan, pandangan tentang jumlah penduduk terbagi menjadi dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan

dianggap pula sebagai pemacu pembangunan (Kumalasari, 2011). Alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang berakibat semakin banyaknya penduduk miskin (Dumairy, 1996 dalam Zenklinov 2021). Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan merangsang output yang lebih tinggi dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro & Smith, 2006 dalam Zenklinov 2021).

2.1.1.6. Dampak Terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan memiliki akibatnya dari dampak seseorang yang memandangnya, beberapa kemiskinan akibat dari dampak, sebagai berikut: (Mubyarto,1999:20)

1. Pengangguran

Pengangguran dihubungkan dari kemiskinan, yang berdampak pada pekerjaan, keterampilan dan pendidikan menjadi hal yang rumit, sulit untuk mendapatkan oleh masyarakat, sulitnya untuk berusaha, mencari pekerjaan yang layak dan yang

lebih baik. Karena sulitnya mencari pekerjaan, maka tidak adanya pendapatan dan penghasilan, sehingga munculnya kekurangan kesehatan dan nutrisi, pada akhirnya tidak mendapat kebutuhan hidup penting untuk hidupnya (Mubyarto,1999:20).

2. Kriminalitas

Kriminalitas adalah dampak kemiskinan kesulitan hidup untuk mencari nafkah dan mengakibatkan pribadinya lupa diri, sehingga mencari hidup yang tepat tanpa kepedulian haram atau halalnya barang curian merupakan alat tukar untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya saja perampokan, pencurian, penipuan dan kriminalitas lainnya, yang bersumber dari dampak kemiskinan. Seseorang yang melakukan kejahatan itu karena kondisi yang buruk atau sulit mencari penghasilan yang baik dan sehingga lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan atau jalan yang baik bagi kehidupannya.

3. Putus sekolah

Mahalnya biaya pendidikan membuat rakyat menyebabkan miskin sehingga terjadi putus sekolah karena sulit untuk mendapatkan uang dan tidak mampu lagi membiayai sekolah. Karena adanya penghambat dan menyebabkan putus sekolah yang mendalam sehingga kesempatan kurang memadai untuk bersaing dengan dunia usaha dan hilangnya pekerjaan, pendapatan dan kesempatan yang layak.

4. Kesehatan

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi

biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

2.1.1.7. Cara Mengatasi Kemiskinan

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada Tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain :

1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok

Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.

2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin

Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasnya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin.

3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.

4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

Program ini bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.

2.1.2. Pengangguran

2.1.2.1. Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran adalah bagian angkatan kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaan. Di Indonesia setiap tahunnya mengalami penambahan angkatan kerja baru dan banyak dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan, bahkan secara kumulatif jumlah pengangguran semakin bertambah dari tahun ke tahun (Hasyim, 2017:13). Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Menurut BPS (2022) tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang mengukur tenaga kerja yang menggambarkan pemanfaat yang kurang terhadap pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran dalam total angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara waktu tidak bekerja dan menganggur. Pengangguran adalah: (1) Penduduk aktif yang sedang mencari pekerjaan, (2) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan, (4) Sekelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

1) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

- 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.2.2. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2008), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 23% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik;
2. Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja;
3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan;
4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengangguran Musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim, misalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah

mereka akan bekerja selama musim panen setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya.

2. Pengangguran Terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan.
3. Pengangguran Tersembunyi adalah pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ataupun lainnya. Pengangguran jenis ini menyebabkan produktivitas kerja yang rendah.
4. Setengah Menganggur adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7- 8 per hari sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi.

2.1.2.3. Faktor Penyebab Pengangguran

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang
2. Kemajuan Teknologi
3. Kurangnya Pendidikan
4. Kemiskinan
5. Putus Hubungan Kerja (PHK)
6. Kesulitan Mencari Lowongan Kerja

2.1.2.4. Dampak Pengangguran

Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah dampak dari adanya pengangguran:

- a. Dampak Bagi Perekonomian Negara
 - Penurunan pendapatan rata-rata penduduk perkapita
 - Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak
 - Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah
 - Menambah hutang negara
- b. Dampak Bagi Masyarakat
 - Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan
 - Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial
 - Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga
 - Dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan

2.1.3. Upah Minimum

2.1.3.1. Pengertian Jumlah Upah Minimum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2 yaitu Upah Minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan

tetap. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam/lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Kaufman (2000) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Upah Minimum Regional (UMR) merupakan upah minimal yang berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi. Dan juga merupakan upah yang diberikan kepada pegawai, karyawan, atau buruh di lingkungan kerja oleh perusahaan dengan standar minimum yang ditentukan. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang ditetapkan Gubernur yang berlaku dalam satu kabupaten/kota sehingga dalam satu provinsi yang sama terdapat perbedaan upah tiap daerahnya.

2.1.3.2. Jenis-Jenis Upah

Menurut Nuraeni et al (2020:25) jenis-jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan hukum perburuhan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal merupakan pembayaran pekerja dengan mengambil rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa kerjaan yang telah dilakukan.

2. Upah Nyata

Upah nyata nilai pembayaran yang menggambarkan dari pendapatan/upah yang diterima buruh. Upah nyata diukur dari sudut kemampuan upah itu sendiri untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja.

3. Upah Hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima pekerja tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok tetapi juga dapat menyelesaikan kebutuhan sosial keluarga seperti pembayaran asuransi jiwa, pendidikan, dan lain-lain.

4. Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas dasar upah pokok termasuk tunjangan yang ditetapkan gubernur sebagai jaringan pengaman.

5. Upah Wajar

Upah wajar merupakan teori yang dikemukakan David Ricardo upah yang dianggap cukup untuk memenuhi hidup pekerja dan keluarganya sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan

2.1.3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Menurut Gilarso (2001: 2014), ada berbagai faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah di Indonesia, yaitu:

1. Tingkat Harga

Tingkat upah memiliki hubungan yang erat dengan tingkat harga. Apabila harga-harga kebutuhan hidup naik, kaum buruh dan para pegawai akan menuntut agar

gaji-gaji disesuaikan dan tingkat upah akan naik. Begitupun sebaliknya, kenaikan upah dapat menyebabkan kenaikan harga.

2. Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya faktor-faktor produksi lain yang membantu, khususnya mesin-mesin dan peralatan canggih serta teknik produksi yang dipakai. Sehingga bila produktivitas tenaga kerja rendah, upah akan rendah pula.

3. Struktur Ekonomi Nasional

Struktur ekonomi dan taraf perkembangannya ikut mempengaruhi tingkat upah yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, penambahan penduduk yang tidak dapat ditampung lagi di sektor pertanian, masih kurangnya industri, dan banyak pengangguran yang bersamaan dengan kekurangan tenaga ahli.

4. Keadilan dan Perikemanusiaan

Tuntutan keadilan yang banyak dilakukan oleh perusahaan yaitu upah nominal dilengkapi dengan tunjangan-tunjangan dan fasilitas lainnya.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu dicapai perlu dihitung adalah pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu harga berlaku

ditahun dasar yang dipilih. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian suatu negara.

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, artinya jumlah produksi dalam negeri merupakan ukuran bagi pertumbuhan ekonomi sedangkan saat ini banyak pengalihan tenaga kerja kepada teknologi (Sopianti dan Ayuningsih, 2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita). Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1994).

2.1.4.2. Proses Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

a. Faktor Ekonomi

1) Sumber Alam

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

2) Akumulasi Modal

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat dibidang ekonomi.

3) Organisasi

Organisasi bersifat melengkapi dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

4) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

b. Faktor Non-Ekonomi

1) Faktor Sosial

Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

2) Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

3) Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korupsi, dengan demikian amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.3. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 1994) ada enam ciri-ciri pertumbuhan yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, dimana ciri-ciri tersebut seringkali terikat satu sama lain. Keenam ciri tersebut yaitu:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk perkapita yang tinggi.
2. Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk perkapita.
3. Laju perubahan struktural yang tinggi yang mencakup kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa dan peralihan usahausaha perseorangan menjadi perusahaan yang beerbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.
4. Semakin tingginya tingkat urbanisasi.
5. Ekspansi dari negara lain.
6. Peningkatan arus barang, modal dan orang antar bangsa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hapsari Wiji Utami, Siti Umajah Masjkuri/2018/ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin	Pendidikan	Upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga Volume 28, No.2, June-November 2018
2	Enia Helga Pratiwi dan Nazarudin Malik/2022/Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Bali Tahun 2011-2020.	Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin	Pendidikan dan Kesehatan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Bali.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)Vol. 6, No. 1, Februari 2022, pp. 112-122
3	Sudirman dan Lili Andriani/2017/ Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi	Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Miskin	Inflasi	Upah minimum mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.	Jurnal of Economics and Business Vol.1 No.1 September 2017
4	Aditya Eka Mahardika M.S & Hendra Kusuma/2022/Analisis Determinan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 -2020	Tingkat Pengangguran Terbuka, LPE, dan Jumlah Penduduk Miskin	IPM	LPE berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Jawa Tengah.	Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(2), 268-283. ISSN: 2716-4799

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Sinta Apriliana, Wiwin Priana, dan Muhamad Wahed/2021/Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Magetan	Pertumbuhan Ekonomi, TPT, dan Jumlah Penduduk Miskin	IPM	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Magetan.	<i>Jurnal Education and Development</i> , vol. 9, no. 3, 2021, pp. 289-294.
6	Theresia Ayu Sani Hutabarat, Moehammad Fathorrazi, M.Abd.Nasir/2023/Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021	Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran	Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.	Volume 7 No. 1 (2023)
7	Sinta Setya Ningrum/2017/Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015	Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Manusia	TPT dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, Desember 2017
8	Putri Indah Sari, Sri Muljaningsih, dan Kiky Asmara/2021/ Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik.	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin	PDRB	TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.	Transformasi Sintaks Jurnal, 2(05). EISSN: 2721-2769

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Istiara Ayu Andani/2017/ Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pengangguran, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Miskin	Inflasi	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan sedangkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.	Eprints UMS
10	Novi Astika Sari & Ketut Suardika Natha/2016/ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali	Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin	Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi	Semua variabel X secara simultan berpengaruh. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.	E-Jurnal EP Unud ISSN: 2303-0178
11	I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka/2015/ Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali	Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin	Pendidikan dan PDRB per Kapita	Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Bali.	E-Jurnal EP Unud, 4[5]: 546-560 ISSN: 2303- 0278
12	Inda Sundari/2018/ Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) dan Upah Minimum (Um) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Jpm) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Tahun 2011-2017)	TPT, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Miskin	IPM	TPT dan upah minimum mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.	E-Jurnal EP Unud, 2 [6] :344-349

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	A.Mahendra/2017/Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara	Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin	Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.	JRAK – Vol.3 No.1, 113-138. ISSN: 2443 - 1079
14	Satria Yuda Anggriawan, Aris Soelistyo, dan Dwi Susilowati/2016/Pengaruh Upah Minimum dan Disitribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur	Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Miskin	Distribusi Pendapatan	Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(2).
15	Indah Purboningtyas, Indah Retno Sari, Tian Guretno, Ari Dirgantara, Dwi Agustina, dan M Al Haris/(2020)/Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	TPT dan Jumlah Penduduk Miskin	IPM	TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.	Jurnal Saintika Unpam, 3(1), 81-88. ISSN: 2655-7312.

2.3. Kerangka Pemikiran

Agar penulis lebih mudah dalam mengerjakan penelitian ini, maka dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin.

2.3.1. Hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran terbuka adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi kemakmuran yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin turun kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang bagi mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila masalah pengangguran terjadi, masalah lain juga akan ikut timbul, masalah tersebut dapat berupa kekacauan politik yang juga akan berdampak pada memburuknya kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang.

Lincoln Arsyad (1997) dalam M, menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selalu berada pada golongan masyarakat yang miskin. Sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk dalam kelompok masyarakat menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan masyarakat yang bekerja secara penuh termasuk dalam golongan masyarakat yang kaya.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Indah Sari, Sri Muljaningsih dan Kiky Asmara (2021) tentang Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat

Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka akan semakin tidak produktif masyarakatnya, sehingga masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang berarti bahwa kemiskinan bertambah.

2.3.2. Hubungan antara Upah Minimum dengan Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Ayu (2018), ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena berbagai sebab dapat dikatakan sebagai kemiskinan, salah satunya adalah upah minimum. Peningkatan upah minimum pekerja akan meningkatkan daya beli mereka yang pada akhirnya akan merangsang semangat kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. Melalui upah minimum akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat meminimalisir masalah kemiskinan. Hal ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang disampaikan Kaufman (2000) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah tepat karena mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Theresia Ayu Sani Hutabarat, Moehammad Fathorrazi, M.Abd.Nasir (2023) tentang Pengaruh

Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa semakin tinggi upah minimum akan memicu penurunan jumlah penduduk miskin. Jadi dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

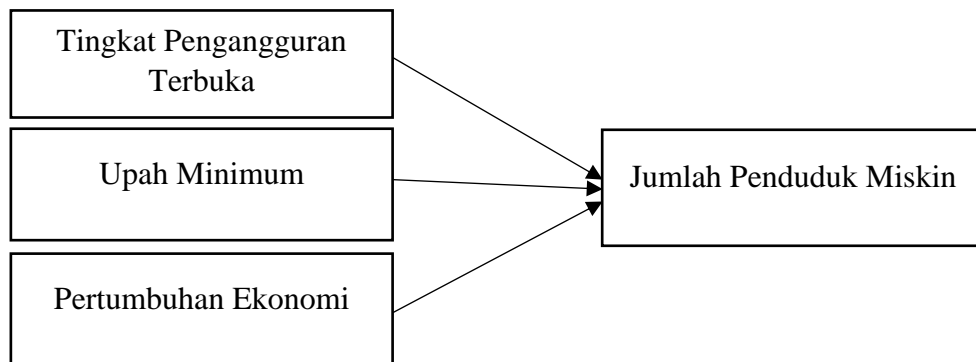
2.3.3. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Jumlah Penduduk

Miskin

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian disuatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga secara tidak langsung peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dapat dikatakan bahwa saat perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Menurut *World Bank* dalam Wahyudi (2010), pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak akan memberi dampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin pada wilayah atau daerah yang masih memiliki masalah dalam kesenjangan pendapatan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi memang tidak mengalami penurunan dalam siklusnya, hanya saja pertumbuhan tersebut tidak merata bagi semua lapisan golongan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Wiji Utami, Siti Umajah, Masjkuri (2018) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat disetiap tahunnya di suatu wilayah atau daerah akan meningkatkan kapasitas perekonomian, yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga pendapatan akan meningkat dan mengurangi resiko seseorang terjerat dalam kemiskinan. Untuk lebih jelas mengenai hubungan antara jumlah penduduk miskin dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis ini berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berarti kebenaran) (Hasan, 2004:31). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif sedangkan upah minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2006-2022.
2. Diduga secara bersama-sama tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2006-2022